

---

## **ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PKB, PBBKB DAN BBNKB TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS TERHADAP PADA JAWA BARAT DAN DKI JAKARTA PERIODE TAHUN 2015-2019)**

---

### **Raynaldo Free Altrio**

*STIE Indonesia Banking School, Jalan Kemang Raya No.35, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta  
altrioreynaldofree@gmail.com*

### **Bani Saad**

*STIE Indonesia Banking School, Jalan Kemang Raya No.35, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta  
bani.saad@ibs.ac.id*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan dan kontribusi pajak yang dihasilkan oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta dengan rentang penelitian 2015- 2019. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan jenis data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Analisis yang digunakan yaitu analisis laju pertumbuhan dan kontribusi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PKB, PBBKB dan BBNKB di Jawa Barat dan DKI Jakarta setiap tahunnya mengalami naik turun, dengan laju pertumbuhan paling tinggi rata-rata 12,39% di provinsi DKI Jakarta dengan kriteria laju pertumbuhan yang tidak berhasil. Sementara kontribusi PKB di Provinsi Jawa Barat rata-rata 36,54% setiap tahunnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kriteria cukup baik. Kata kunci : PKB, PBBKB, BBNKB, PAD, Jawa Barat, DKI Jakarta

### **Abstract**

*The purpose of this study is to find out the growth rate and tax contribution generated by Motor Vehicle Tax (PKB), Motor Vehicle Fuel Tax (UNKB) and Motor Vehicle Name Duty (BBNKB) in West Java province and DKI Jakarta with research range 2015-2019. This type of research is quantitative descriptive with the type of data used, namely primary and secondary data. The analysis used is the analysis of growth rates and contributions. The results of the study showed that the growth rate of PKB, UNKB and BBNKB in West Java and DKI Jakarta annually experienced ups and downs, with the highest growth rate averaging 12.39% in DKI Jakarta province with unsuccessful growth rate criteria. While the contribution of PKB in West Java Province averages 36.54% annually to Regional Original Income (PAD) with quite good criteria.*

*Keywords: PKB, PBBKB, BBNKB, PAD, West Java, DKI Jakarta*

---

\*) Corresponding Author

## 1. PENDAHULUAN

Pendapatan Negara didapat dari rakyatnya dari pengumpulan pajak dan dari hasil kekayaan alam yang terdapat di negara tersebut. Sumber-sumber tersebut adalah sumber yang penting dan menyerahkan pendapatan terhadap negara. Pengakuan pajak di Indonesia bisa diklasifikasikan menjadi 2 bagian adalah Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara seperti yang ada dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) SERTA Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan kepemilikan dari Tanah dan Bangunan (BPHTB). Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan produktivitas perkapita pada jangka panjang (I.&F.H. Rahmadani, 2018). Jika digunakan pada PKB, PBBKB dan BBNKB maka laju pertumbuhan merupakan proses peningkatan penerimaan PKB, PBBKB dan BBNKB pada jangka panjang. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah salah satu sumber penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga berpengaruh. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikumpulkan dari kepemilikan serta hak kepemilikan kendaraan bermotor juga membentuk objek pajak, serta subjek pajaknya yaitu individual pribadi atau badan sebagai pemilik kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ialah pajak tempat penyerahan hak milik kendaraan bermotor digunakan untuk walhasil perjanjian dua pihak atau perbuatan satu pihak atau waktu yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha (Siahaan, 2005). Menurut Suprayetno, 2003 (dalam Rakatitha & Gayatri, 2017). Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair dan gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) (Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dipungut pajak atas bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air. Subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor yaitu yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor seperti orang pribadi, maupun badan.

Pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Penyedia yang dimaksud adalah produsen dan/atau importer bahan bakar kendaraan ber motor, baik untuk dijual atau untuk digunakan sendiri. Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi dari 10 provinsi penghasil pendapatan daerah terbesar di Indonesia dan itu merupakan salah satu alasan peneliti memilih meneliti PAD Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat sampai saat ini masih termasuk daerah yang memiliki kemandirian keuangan yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2016 mencapai 61,54% atau senilai Rp 17.042 Triliun. Adapun dana rasionya sebesar 38,36% atau senilai Rp 10.622 Triliun. Selebihnya dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar 0,10% atau senilai Rp 28.468 Milyar. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu daerah otonom yang turut serta melakukan pembangunan dan tugas pemerintahan dengan baik untuk jangka pendek maupun panjang. Dengan adanya otonomi daerah Provinsi DKI Jakarta harus dapat mengolah dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang ada yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaannya. Hal ini dilakukan agar pemerintahan DKI Jakarta tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan pembangunan berjalan dengan baik. Untuk menganalisis besar perbandingan laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, Untuk menganalisis besar perbandingan laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta Untuk menganalisis besar perbandingan laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta.

## 2. LANDASAN TEORI

### Teory of Planed Behaviour (TPB)

Ajzen mengembangkan *Theory of Reasoned Action* menjadi sebuah teori lain, yaitu *Theory of Planned Behavior* dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Faktor utama dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) ini adalah niat seseorang individu untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut (Kurniawati & Toly, 2014).

### Stewardship Theory

*Grand theory* pada penelitian ini menggunakan *stewardship theory*. *Stewardship theory*

menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Dalam hal ini pemerintah selaku steward sebagai pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal sebagai pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat

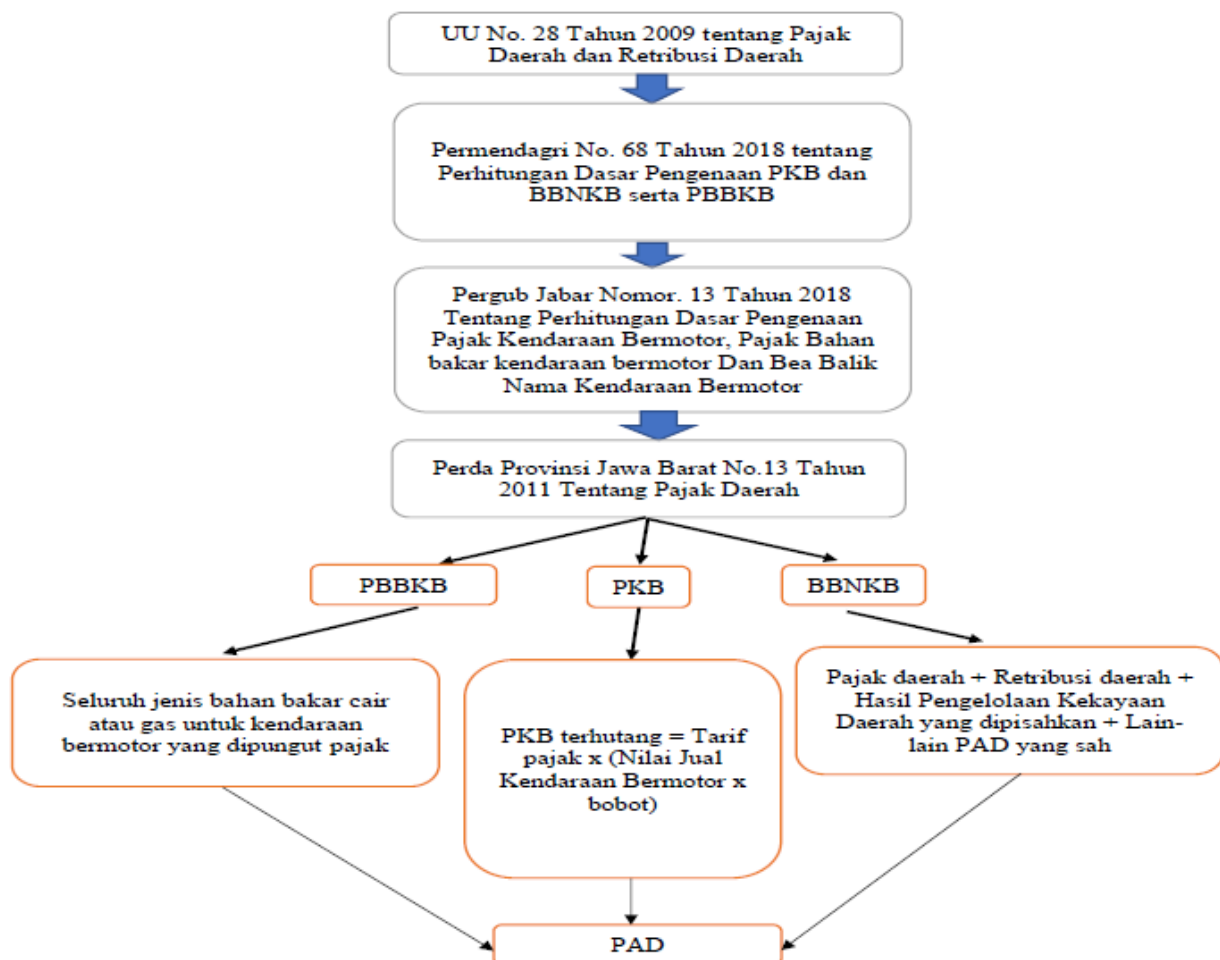
### Teori Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris *contribute*, *contribution*, yang menyandang arti ialah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri ataupun sumbangan. Pada hal tersebut kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan ialah berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

### Teori Laju Pertumbuhan

Laju Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang (I. & F. H. Rahmadani, 2018). Jika diterapkan dalam PKB, PBBKB, dan BBNKB maka laju pertumbuhan adalah proses kenaikan penerimaan PKB, PBBKB, dan BBNKB dalam jangka panjang. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah pemerintah daerah selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif.

### KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Objek Penelitian**

Objek penelitian yang peneliti angkat ialah Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (X2) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X3), dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta sebagai (Y) periode tahun 2015-2019.

#### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

##### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Halim (2014), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 18, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapat daerah yang dikumpulkan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Operasional variable Pendapatan Asli Daerah, diukur dengan rumus;

**PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan + Lain - lain PAD yang sah**

##### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor ialah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor merupakan semua kendaraan beroda dan keterkaitannya yang dimanfaatkan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik seperti motor dan peralatan lainnya yang digunakan untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang berkaitan, termasuk peralatan - peralatan berat dan peralatan-peralatan besar, yang pada pengoperasiannya menggunakan roda dan motor dan tidak terikat secara paten/permanen juga kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Operasional Variabel Pajak Kendaraan Bermotor, diukur dengan rumus:

**PKB terutang = Tarif pajak x Dasar Pengenaan Pajak**

Keterangan :

Dasar Pengenaan Pajak = Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) x bobot

##### **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ialah pajak atas pemberian hak milik kendaraan bermotor karena akibat perjanjian dua pihak yang bersangkutan atau kegiatan perorangan atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukkan ke dalam badan usaha. Operasional variabel PKB, diukur dengan

rumus:

**BBNKB terutang = Tarif Pajak x Nilai Jual Kendaraan Bermotor**

##### **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Bagaikan yang telah diatur didalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun

2009 mengenai pajak daerah juga retribusi daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah bagian pajak termasuk yang ada pada pajak provinsi. Penafsiran dari bahan bakar kendaraan bermotor itu sendiri ialah seluruh jenis bahan bakar cair atau gas yang dimanfaatkan untuk kendaraan bermotor, sedangkan dibandingkan pajaknya dipungut pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang diadakan ataupun dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. Operasional variabel PBBKB, diukur dengan rumus :

**Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan mengalihkan tarif pajak sebesar 5% dengan dasar pengenaan pajak seperti nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak.**

### Teknik Pengolaan dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan ialah metode analisis deskriptif. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendefinisikan ataupun menampilkan data yang sudah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud mengenakan kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan formulasi Kontribusi (Halim, 2004) dan Laju Pertumbuhan (Halim, 2007)

Untuk menghitung laju pertumbuhan penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Jawa Barat digunakan rumus berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

$G_x$  = Laju pertumbuhan : PKB, PBBKB dan BBNKB Provinsi per tahun.

$X_t$  = Realisasi penerimaan : PKB, PBBKB dan BBNKB Provinsi pada tahun tertentu.

$X_{(t-1)}$  = Realisasi penerimaan : PKB, PBBKB dan BBNKB Provinsi pada tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui besarnya Laju Pertumbuhan PKB, PBBKB dan BBNKB terhadap penerimaan PAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Nilai Laju Pertumbuhan**

Sumber: Halim (2007)

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
<30%	Tidak Berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi ialah sebagai berikut:

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

$P_n$  = Kontribusi penerimaan : PKB, PBBKB dan BBNKB Provinsi Jawa Barat terhadap Pendapatan Asli Daerah

$QY$  = Realisasi PAD Provinsi

$QX$  = Realisasi penerimaan : PKB, PBBKB dan BBNKB Provinsi

$N$  = Tahun (Periode tertentu)

Untuk mengetahui besarnya kontribusi PKB, PBBKB dan BBNKB terhadap penerimaan PAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.3 Kriteria Kontribusi**

Kontribusi	Kriteria Kontribusi
0,00% - 10,00%	Sangat Kurang
10,00% - 20,00%	Kurang
20,00% - 30,00%	Sedang
30,00% - 40,00%	Cukup Baik
40,00% - 50,00%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Analisis Laju Pertumbuhan PKB Jawa Barat dan DKI Jakarta

Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Laju Pertumbuhan	Kriteria
2014	4.938.840.000.000,00	-	-	-
2015	5.355.778.195.650,00	416.938.195.650,00	8,44%	Tidak Berhasil
2016	6.185.202.921.550,00	829.424.725.900,00	15,48%	Tidak Berhasil
2017	6.534.054.655.292,00	348.851.733.742,00	5,64%	Tidak Berhasil
2018	7.540.770.278.845,00	1.006.715.623.553,00	15,41%	Tidak Berhasil
2019	8.174.357.408.900,00	633.587.130.055,00	8,40%	Tidak Berhasil
Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Laju Pertumbuhan	Kriteria
2014	4.979.110.607.650,00	-	-	-
2015	6.090.200.500.774,00	1.111.089.893.124,00	22,32%	Tidak Berhasil
2016	7.143.530.355.999,00	1.053.329.855.225,00	17,30%	Tidak Berhasil
2017	8.005.898.498.574,00	862.368.142.575,00	12,07%	Tidak Berhasil
2018	8.553.632.204.640,00	547.733.706.066,00	6,84%	Tidak Berhasil
2019	8.844.155.231.721,00	290.523.027.081,00	3,40%	Tidak Berhasil

Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu penelitian realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, tetapi hal ini tidak diikuti oleh peningkatan laju pertumbuhan dimana letaknya belum stabil untuk meningkat. Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta dalam rentang waktu penelitian realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu mengalami peningkatan, hal ini berbanding terbalik dengan laju pertumbuhannya yang cenderung mengalami penurunan disetiap tahunnya, tentu nya hal ini dapat menjadi perhatian pemerintah untuk berupaya meningkatkan laju pertumbuhannya. Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu penelitian, kontribusi pajak kendaraan bermotor menghasilkan rata-rata 36,54% terhadap PAD, sedangkan DKI Jakarta, pajak kendaraan bermotor nya menghasilkan rata-rata kontribusi 18,95% per tahun nya terhadap PAD.

##### PBBKB Jawa Barat dan DKI Jakarta

Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Laju Pertumbuhan	Kriteria
2014	2.119.920.000.000,00	-	-	-
2015	2.377.653.929.059,00	257.733.929.059,00	12,16%	Tidak Berhasil
2016	2.007.858.327.949,00	(369.795.601.110,00)	(15,55)%	Tidak Berhasil
2017	2.314.028.808.428,00	306.170.480.479,00	15,25%	Tidak Berhasil
2018	2.512.911.700.663,00	198.882.892.235,00	8,59%	Tidak Berhasil
2019	2.616.034.041.920,00	103.122.341.257,00	4,10%	Tidak Berhasil
Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Laju Pertumbuhan	Kriteria
2014	1.170.105.269.170,00	-	-	-
2015	1.232.836.931.554,00	62.731.662.384,00	5,36%	Tidak Berhasil
2016	1.094.901.392.986,00	(137.935.538.568,00)	(11,19)%	Tidak Berhasil
2017	1.153.231.799.802,00	58.330.406.816,00	5,33%	Tidak Berhasil
2018	1.244.763.661.552,00	91.531.861.720,00	7,94%	Tidak Berhasil
2019	1.262.748.852.467,00	17.985.190.945,00	1,44%	Tidak Berhasil

Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini diikuti dengan laju pertumbuhan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang turun, realisasi penerimaan pajak kembali membaik pada 2017 hingga 2019 dengan laju pertumbuhan yang terus menurun. Sementara DKI Jakarta pada tahun 2015 realisasi

penerimaan pajaknya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan menurun di tahun 2016 hingga laju pertumbuhannya negatif, laju pertumbuhan dari 2017 hingga 2019 mengalami naik turun, untuk meningkatkan laju pertumbuhan pemerintah daerah perlu memperhatikan potensi pajak yang dapat digali. Kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor provinsi Jawa Barat rata-rata memberikan kontribusi 12,90% setiap tahun terhadap PAD, sementara DKI Jakarta memberikan 2,98% kontribusi per tahun terhadap PAD.

#### BBNKB Jawa Barat dan DKI Jakarta

Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Laju Pertumbuhan	Kriteria
2014	5.301.029.000.000,00	-	-	-
2015	4.662.471.061.900,00	(638.557.938.100,00)	(12,05)%	Tidak Berhasil
2016	4.984.049.418.600,00	321.578.356.700,00	6,89%	Tidak Berhasil
2017	5.092.551.608.700,00	108.502.190.100,00	2,18%	Tidak Berhasil
2018	5.527.989.187.700,00	435.437.579.000,00	8,55%	Tidak Berhasil
2019	6.300.781.441.900,00	772.792.254.200,00	13,98%	Tidak Berhasil
Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Kenaikan/Penurunan	Kenaikan/Penurunan	Kenaikan/Penurunan
2014	5.526.393.737.100,00	-	-	-
2015	4.685.403.450.610,00	(840.990.286.490,00)	(15,22) %	Tidak Berhasil
2016	5.003.996.134.800,00	318.592.684.190,00	6,79%	Tidak Berhasil
2017	5.027.240.287.850,00	23.244.153.050,00	0,46%	Tidak Berhasil
2018	5.350.625.602.850,00	323.385.315.000,00	6,43%	Tidak Berhasil
2019	5.403.535.434.750,00	52.909.831.900,00	0,99%	Tidak Berhasil

Selama periode 2015-2019 realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Jawa Barat mengalami laju pertumbuhan yang cenderung naik turun setiap tahunnya, bahkan di tahun 2015 terjadi penurunan realisasi cukup besar sehingga berdampak pada laju pertumbuhan yang negatif, di tahun 2019 kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi dalam realisasi dan membangun laju pertumbuhan sebesar 13,98%. Sedangkan, daerah DKI Jakarta realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor mengalami penurunan yang cukup tinggi hingga laju pertumbuhan negatif, realisasi kembali membaik di tahun 2016-2019 tetapi tidak diikuti dengan laju pertumbuhan yang tidak konsisten. Maka dapat diperhatikan oleh pemerintah daerah agar berkomitmen dalam mempertahankan kinerja pendapatan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dan dapat menggali potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor, dengan laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor selama rentang waktu penelitian mengalami peningkatan dan penurunan laju pertumbuhan pajak, Selain itu untuk bea balik nama kendaraan bermotor Jawa Barat memberikan kontribusi rata-rata sebesar 28,86% per tahunnya, sedangkan DKI Jakarta mampu memberikan kontribusi sebesar 12,62% per tahunnya terhadap PAD.

#### Analisis Kontribusi

##### PKB Jawa Barat dan DKI Jakarta

Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Jumlah PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	5.355.778.195.650,00	16.032.856.414.345,00	33,41%	Cukup Baik
2016	6.185.202.921.550,00	17.042.895.113.672,00	36,29%	Cukup Baik
2017	6.534.054.655.292,00	18.081.123.739.824,00	36,14%	Cukup Baik
2018	7.540.770.278.845,00	19.642.915.448.763,00	38,39%	Cukup Baik
2019	8.174.357.408.900,00	21.244.266.598.017,00	38,48%	Cukup Baik
Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Jumlah PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	6.090.200.500.774,00	33.686.176.815.708,00	18,08%	Kurang
2016	7.143.530.355.999,00	36.888.017.587.716,00	19,37%	Kurang
2017	8.005.898.498.574,00	43.901.488.807.743,00	18,24%	Kurang
2018	8.553.632.204.643,00	43.327.136.602.811,00	19,74%	Kurang
2019	8.844.155.231.721,00	45.707.400.003.802,00	19,35%	Kurang

Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu penelitian, kontribusi pajak kendaraan bermotor menghasilkan rata-rata 36,54% terhadap PAD, sedangkan DKI Jakarta, pajak kendaraan bermotor nya menghasilkan rata-rata kontribusi 18,95% per tahun nya terhadap PAD.

**PBBKB Jawa Barat dan DKI Jakarta**

Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Jumlah PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	2.377.653.929.059,00	16.032.856.414.345,00	14,83%	Kurang
2016	2.007.858.327.949,00	17.042.895.113.672,00	11,78%	Kurang
2017	2.314.028.808.428,00	18.081.123.739.824,00	12,80%	Kurang
2018	2.512.911.700.663,00	19.642.915.448.763,00	12,79%	Kurang
2019	2.616.034.041.920,00	21.244.266.598.017,00	12,31%	Kurang
Tahun Anggaran	Realisasi	Jumlah PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	1.232.836.931.554,00	33.686.176.815.708,00	3,66%	Sangat Kurang
2016	1.094.901.392.986,00	36.888.017.587.716,00	2,97%	Sangat Kurang
2017	1.153.231.799.802,00	43.901.488.807.743,00	2,63%	Sangat Kurang
2018	1.244.763.661.522,00	43.327.136.602.811,00	2,87%	Sangat Kurang
2019	1.262.748.852.467,00	45.707.400.003.802,00	2,76%	Sangat Kurang

Kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor provinsi Jawa Barat rata-rata memberikan kontribusi 12,90% setiap tahun terhadap PAD, sementara DKI Jakarta memberikan 2,98% kontribusi per tahun terhadap PAD.

**BBNKB Jawa Barat dan DKI Jakarta**

Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Jumlah PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	4.662.471.061.900,00	16.032.856.414.345,00	29,08%	Sedang
2016	4.984.049.418.600,00	17.042.895.113.672,00	29,24%	Sedang
2017	5.092.551.608.700,00	18.081.123.739.824,00	28,17%	Sedang
2018	5.527.989.187.700,00	19.642.915.448.763,00	28,14%	Sedang
2019	6.300.781.441.900,00	21.244.266.598.017,00	29,66%	Sedang
Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Jumlah PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	4.685.403.450.610,00	33.686.176.815.708,00	13,91%	Kurang
2016	5.003.996.134.800,00	36.888.017.587.716,00	13,57%	Kurang
2017	5.027.240.287.850,00	43.901.488.807.743,00	11,45%	Kurang
2018	5.350.625.602.850,00	43.327.136.602.811,00	12,35%	Kurang
2019	5.403.535.434.750,00	45.707.400.003.802,00	11,82%	Kurang

Untuk bea balik nama kendaraan bermotor Jawa Barat memberikan kontribusi rata-rata sebesar 28,86% per tahunnya, sedangkan DKI Jakarta mampu memberikan kontribusi sebesar 12,62% per tahunnya terhadap PAD.

**5. PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu penelitian 2015-2019, laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) berdasarkan kriteria dari Halim (2007) termasuk ke dalam kriteria tidak berhasil, dengan persentase laju pertumbuhan setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak konsisten. Tetapi berdasarkan analisis bahwa pajak kendaraan bermotor rata-rata mengalami laju pertumbuhan paling tinggi 10,67%. Sementara Provinsi DKI Jakarta laju pertumbuhan PKB, PBBKB dan BBNKB juga termasuk ke dalam kriteria tidak berhasil, dengan rata-rata laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor paling tinggi 12,39%.
2. Pada Provinsi Jawa Barat kontribusi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar



kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap PAD dalam rentang waktu penelitian 2015-2019 berdasarkan kriteria dari Depdagri (2006) termasuk kriteria cukup baik dengan kontribusi rata-rata 36,54% untuk PKB, PBBKB dengan persentase rata-rata kontribusi 12,90% termasuk kriteria kurang, dan BBNKB dengan rata-rata kontribusi 28,86% dengan kriteria sedang. Sedangkan, untuk DKI Jakarta termasuk kriteria kurang dengan kontribusi rata-rata 18,95% untuk PKB, PBBKB dengan persentase rata-rata kontribusi 2,98% termasuk kriteria sangat kurang, dan BBNKB dengan rata-rata kontribusi 12,62% masuk kedalam kriteria kurang.

3. Dari dua provinsi diatas yang telah diteliti yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta, keduanya memiliki perbedaan. Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, sedangkan DKI Jakarta menduduki peringkat ke enam. Walaupun DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk lebih sedikit dari Jawa Barat namun untuk jumlah kendaraan bermotor penggunaannya paling banyak dibandingkan Jawa Barat. Seharusnya dengan begitu DKI Jakarta mampu lebih baik dibandingkan Jawa Barat dalam mengelola potensi pajak yang dapat digali agar optimal. Dari analisis sebelumnya bahwa secara umum DKI Jakarta hanya mampu unggul dalam laju pertumbuhan PKB dengan rata-rata 12,39% dan kontribusi PKB, PBBKB dan BBNKB tergolong kurang. Jawa Barat yang tingkat kepemilikan kendaraan bermotornya lebih sedikit mampu unggul dari DKI Jakarta dalam laju pertumbuhan PBBKB dan BBNKB, dan kontribusi yang dihasilkan PKB, PPBBKB dan BBNKB tergolong lebih baik jika dibandingkan DKI Jakarta. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor salah satunya kesadaran para wajib pajak untuk taat membayar pajak dan kebijakan yang diambil pemerintah untuk menarik minat wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Dari penelitian dan wawancara yang telah dilakukan terhadap pihak Bapenda Provinsi Jawa Barat dan Bapenda Provinsi DKI Jakarta bahwa Faktor penentu naik turunnya pendapatan pajak adalah kesadaran para wajib pajak untuk membayarkan pajak dan banyaknya tingkat ketidakpatuhan pajak serta keterlambatan pembayaran pajak dan juga faktor ekonomi masyarakat. Juga Untuk penentuan naik atau turunya pajak daerah bapenda Jawa Barat dan DKI Jakarta sudah rutin dengan memproyeksikan penerimaan periode berjalan dengan penerimaan tahun yang akan datang, dengan memperhatikan faktor ekonomi, apakah itu sedang stabil atau sedang invlasi, dsb.

### Keterbatasan

Pada penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Diantara nya yaitu:

1. Peneliti hanya menggunakan sebagian kecil jenis pajak yang termasuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni tiga komponen yang berkontribusi besar seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
2. Peneliti hanya membandingkan dua provinsi yang ada di Indonesia yakni Jawa Barat dan DKI Jakarta.
3. Dalam menganalisis, peneliti hanya menggunakan analisis laju pertumbuhan dan analisis kontribusi.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu :

1. Menggunakan jenis pajak yang seluruhnya termasuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak hotel, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak perolehan hak tanah atau bangunan dan lainnya
2. Dapat melakukan perbandingan lebih dari dua provinsi agar hasil yang didapat dapat berguna untuk pemerintah daerah lainnya sebagai bahan perbandingan.
3. Analisis yang digunakan agar menambahkan efektivitas untuk melihat berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Auliah, A. N. (2018). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Takalar. *Jurnal Riset Edisi Xxvi*, 43-56.
- Gunawan, E. (2018). Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 2(1), 2018, 1-54.
- Indriani, N. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Baliknama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2017 . *Fakultas Ekonomi Universitas Semarang Semarang*, 1-64.
- Margaretha Anggraini, A. A. (2014). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan. *Stie Mdp; Jl. Rajawali, No 14, Palembang, Telp (0711)376400/Fax (0711)376360 3Jurusan Akuntansi, Stie Mdp, Palembang*, 3-12.
- Nurul Aliah, A. B. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbn-Kb) Terhadap Pad Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 33-49.
- Nurul Karina, N. \_\_. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Emba Vol.4 No.1 Maret 2016*, 715-722.
- Putu Nadya Kardevi Rakatitha, G. (2017). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1575-1600.
- Rahmayati, S. W. (Seminar Nasional Dan The 5th Call For Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah . 1-20.
- Ruslinda Agustina, R. A. (2015). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012 . *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 83-99.
- Septiani, P. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhamadiyah*, 1-7.
- Wahidah, A. S. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Palopo. *Jurnal Of Economic, Management And Accounting - Jemma* -, 11-21.
- Yani Rizal, M. H. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Di Samsat Aceh Timur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Aceh . *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, Vol 9, No 1 Januari 2018*, 84-91.